Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keguruan
Vol. 2 No. 5 (2026). pp. 395-406
ISSN: 3123-2159
DOI: https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i5.70

Peran Strategis Perencanaan Evaluasi Program Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan di SMK Al Imran

Bella Adelia Ananta, Faiqoh, Rusdiana Navlia

Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; bellaadelia2006@gmail.com (Bella Adelia Ananta)

Received: 15-09-2026 Revised: 17-10-2026 Accepted: 13-11-2026

How to Cite: Bella Adelia Ananta, Faiqoh, F., & Rusdiana Navlia. (2026). The Strategic Role of Educational Program Evaluation Planning in Enhancing the Quality of Educational Services at SMK Al Imran. *Comprehensive: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Keguruan*, *2*(5), 395–406. https://doi.org/10.65118/comprehensive.v2i5.70

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

The Strategic Role of Educational Program Evaluation Planning in Enhancing the Quality of Educational Services at SMK Al Imran

Abstract. The quality of educational services does not emerge merely from the implementation of programs; rather, it stems from programs that are continuously monitored, assessed based on their outcomes, and improved through systematic planning. This article examines the strategic role of educational program evaluation planning in enhancing the quality of educational services at SMK Al Imran. The study employs a qualitative approach, drawing on two data sources: a literature review of publications concerning program evaluation, the CIPP model, and educational quality management, as well as interviews with the school principal and the vice principal for curriculum affairs. The analysis focuses on five key areas: the evaluation planning process, the determination of objectives and success indicators, planning constraints, the contribution of evaluation planning to service quality, and the planning of follow-up actions. The findings indicate that evaluation planning at this school follows a systematic framework—encompassing program selection, objective formulation, the establishment of assessment criteria, and the preparation of data collection methods—with the involvement of the principal, teachers, and educational staff. Evaluation objectives are derived from program goals and school needs, then translated into measurable and observable indicators. Primary constraints include limitations in time, facilities, data, coordination, and budget. Nevertheless,

evaluation planning serves as a guide for identifying program strengths and weaknesses, with follow-up actions structured through the establishment of priorities, the assignment of responsibilities, and the scheduling of implementation. This article suggests strengthening the database, streamlining administrative burdens, and utilizing more comprehensive evaluation frameworks, such as the CIPP model.

Keywords: program evaluation planning, quality of educational services, success indicators, evaluation follow-up, SMK Al Imran

Abstrak. Mutu layanan pendidikan tidak lahir dari program yang dijalankan begitu saja, melainkan dari program yang terus diperiksa, dibaca hasilnya, dan diperbaiki secara terencana. Artikel ini mengkaji peran strategis perencanaan evaluasi program pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMK Al Imran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan dua sumber data, kajian literatur atas publikasi mengenai evaluasi program, model CIPP, dan manajemen mutu pendidikan, serta wawancara dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Analisis difokuskan pada lima hal, yaitu proses perencanaan evaluasi, penentuan tujuan dan indikator keberhasilan, kendala perencanaan, kontribusi perencanaan evaluasi terhadap mutu layanan, dan perencanaan tindak lanjut. Temuan menunjukkan bahwa perencanaan evaluasi di sekolah ini sudah memiliki kerangka yang sistematis, mulai dari pemilihan program, perumusan tujuan, penetapan aspek penilaian, hingga penyiapan metode pengumpulan data, dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuan evaluasi diturunkan dari tujuan program dan kebutuhan sekolah, lalu diterjemahkan ke dalam indikator yang terukur dan teramati. Kendala utama meliputi keterbatasan waktu, sarana, data, koordinasi, dan anggaran. Meskipun demikian, perencanaan evaluasi berfungsi sebagai pedoman untuk mengenali kekuatan dan kelemahan program, dan tindak lanjutnya disusun melalui penentuan prioritas, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaan. Artikel ini menyarankan penguatan basis data, pemadatan beban administrasi, serta pemanfaatan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif seperti CIPP.

Kata kunci: perencanaan evaluasi program, mutu layanan pendidikan, indikator keberhasilan, tindak lanjut evaluasi, SMK Al Imran

PENDAHULUAN

Setiap sekolah menjalankan banyak program kegiatan pembelajaran, pembinaan kesiswaan, pengembangan kompetensi guru, pengelolaan sarana, hingga kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Hal yang masih sering luput dari perhatian adalah apakah program-program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Evaluasi program menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana pelaksanaan suatu program mampu mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan hasil yang nyata sesuai dengan harapan awal. Evaluasi bukan sekadar kegiatan akhir tahun untuk memenuhi tuntutan laporan, melainkan mekanisme untuk menilai nilai dan manfaat suatu program berdasarkan data, sehingga keputusan tentang kelanjutan, perbaikan, atau penghentian program tidak bertumpu pada kesan semata (Ambiyar & Muharika, 2019).

Bagi sekolah menengah kejuruan, hal ini menjadi semakin penting karena sekolah kejuruan bertanggung jawab tidak hanya atas capaian akademik, tetapi juga atas kesiapan kerja peserta didik, relevansi kurikulum dengan kebutuhan lapangan, dan kualitas fasilitas praktik. SMK Al Imran, sebagai satuan pendidikan yang terus berupaya meningkatkan mutu layanannya, menghadapi tantangan yang sama bagaimana memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan peserta didik dan pemangku kepentingan.

Perencanaan menjadi titik awal yang menentukan evaluasi apa yang dirancang dengan baik akan menunjukkan dengan jelas apa yang dinilai, mengapa dinilai, siapa yang menilai, dengan alat apa, dan untuk keputusan apa hasilnya dipakai. Kajian tentang rancangan evaluasi menekankan bahwa perencanaan mencakup konsep, tahapan, dan komponen yang saling berkait, sehingga evaluasi yang dilakukan tanpa perencanaan cenderung menghasilkan data yang tercecer dan sulit dimanfaatkan (Hidayah & Navlia, 2025). Dengan kata lain, mutu evaluasi sangat ditentukan oleh mutu perencanaannya dan mutu layanan pendidikan pada gilirannya dipengaruhi oleh mutu evaluasi.

Peran strategis perencanaan evaluasi terlihat pertama-tama pada kemampuannya mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan program. Tanpa rancangan yang jelas, keberhasilan hanya dikenali lewat anggapan umum, dan kekurangan baru terasa ketika masalah sudah membesar. Evaluasi yang terstruktur memungkinkan sekolah memotret kondisi program secara lebih jujur, sehingga potensi perbaikan dapat ditemukan lebih awal (Astutik & Navlia, 2025). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa evaluasi yang tertata berkontribusi pada optimalisasi penyelenggaraan pendidikan, karena hasil penilaian menjadi dasar untuk menata ulang proses dan sumber daya.

Hal kedua yang tidak kalah penting adalah penentuan tujuan dan indikator keberhasilan yang jelas. Tujuan evaluasi yang kabur akan melahirkan instrumen yang kabur pula, dan indikator yang tidak terukur akan membuat kesimpulan evaluasi mudah diperdebatkan. Literatur tentang dasar-dasar dan ruang lingkup evaluasi pendidikan menempatkan perumusan tujuan dan kriteria sebagai langkah awal yang menentukan arah seluruh proses (Navlia & Kaila, 2025). Indikator yang baik menerjemahkan tujuan yang abstrak menjadi sesuatu yang dapat diamati, dihitung, atau dibandingkan.

Ketiga, perencanaan evaluasi sekolah sering kali harus menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kelancaran proses pelaksanaannya. Dalam praktik, sekolah berhadapan dengan keterbatasan waktu, tenaga, sarana, data, dan anggaran. Hambatan semacam ini lazim dijumpai pada lembaga pendidikan, termasuk lembaga

pendidikan berbasis keislaman yang menjadikan evaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga mutu. Memahami kendala ini penting karena rancangan evaluasi yang ideal di atas kertas belum tentu dapat dijalankan di lapangan.

Keempat, perencanaan evaluasi memiliki kaitan langsung dengan peningkatan mutu layanan pendidikan. Mutu layanan adalah konsep yang luas yang menyangkut proses pembelajaran, kebutuhan peserta didik, kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, serta dukungan fasilitas. Kajian sistematis tentang manajemen mutu layanan pendidikan di Indonesia memperlihatkan bahwa mutu hanya dapat dijaga bila ada siklus pengelolaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan perbaikan. Evaluasi program adalah bagian yang menghubungkan pemantauan dengan perbaikan, dan perencanaannya yang menentukan apakah hubungan itu berfungsi.

Kelima, hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen karena nilai evaluasi baru terwujud ketika temuannya ditindaklanjuti. Penelitian tentang evaluasi program pendidikan berkelanjutan menegaskan bahwa kesinambungan antara evaluasi dan perbaikan merupakan syarat agar kualitas pembelajaran benar-benar meningkat. Sistem penjaminan mutu internal pun hanya bermakna bila hasil penilaiannya kembali menjadi bahan pembenahan standar mutu di sekolah (Maulana & Suwadi, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyentuh bidang ini dari berbagai sisimulai seperti kajian berbasis model CIPP (*context, input, process, product*) pada program pembelajaran bahasa menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh dapat mengungkap kekuatan sekaligus kelemahan program pada tiap tahapnya. Studi kasus penerapan CIPP pada evaluasi mutu tingkat sekolah memperlihatkan manfaat serupa pada konteks persekolahan. Tinjauan literatur tentang pendekatan CIPP pada program pendidikan di Indonesia dan studi pustaka lain tentang model ini juga merekam luasnya pemakaian CIPP sebagai kerangka evaluasi (Sulkifli et al., 2024). Tinjauan sistematis terbaru bahkan menyoroti tren, penerapan, sekaligus celah penelitian pada model tersebut. Di sisi manajemen mutu, penelitian tentang strategi kepala sekolah dalam komunikasi untuk meningkatkan mutu pendidikan serta tentang supervisi pendidikan dalam memperkuat sistem manajemen mutu sekolah menunjukkan peran kepemimpinan dan pengawasan dalam menjaga mutu. Evaluasi kinerja tenaga administrasi di madrasah juga memberi gambaran bahwa evaluasi dapat diterapkan pada unsur pendukung layanan, bukan hanya pada pembelajaran (Wulan et al., 2026).

Jika dicermati sebagian besar kajian tersebut berfokus pada model evaluasi pada konsep umum atau pada aspek tertentu seperti pembelajaran dan kinerja staf. Yang masih jarang digali adalah bagaimana *perencanaan* evaluasi, yakni tahap sebelum data dikumpulkan, dijalankan oleh satuan pendidikan kejuruan tertentu dan bagaimana tahap itu dihubungkan secara eksplisit dengan tujuan, indikator, kendala, mutu layanan, dan tindak lanjut dalam satu kerangka pembahasan. Inilah kesenjangan penelitian yang menjadi dasar kajian di SMK Al Imran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis (1) perencanaan evaluasi program pendidikan di SMK Al Imran, (2)

penentuan tujuan dan indikator keberhasilan, (3) kendala yang dihadapi, (4) peran perencanaan evaluasi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan (5) perencanaan tindak lanjut hasil evaluasi. Urgensinya terletak pada dua hal yaitu secara praktis, temuan dapat menjadi bahan refleksi bagi sekolah dalam memperkuat tata kelola evaluasinya. Secara akademik, kajian ini menambah bukti kontekstual tentang tahap perencanaan evaluasi yang selama ini lebih sering dibahas secara konseptual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena yang hendak dipahami bukan angka capaian program, melainkan cara sekolah merancang evaluasi, alasan di balik keputusan perencanaannya, serta pengalaman para pelaku dalam menghadapi hambatan. Persoalan semacam itu lebih tepat ditelaah melalui penafsiran atas penjelasan para pelaku daripada melalui pengukuran statistik.

Data dikumpulkan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Jalur pertama adalah kajian literatur, yaitu penelaahan artikel jurnal dan buku tentang evaluasi program pendidikan, model CIPP, dan manajemen mutu layanan pendidikan. Kajian ini membangun kerangka konseptual sekaligus menjadi pembanding bagi temuan lapangan. Jalur kedua adalah wawancara dengan dua informan kunci di SMK Al Imran, yaitu Kepala sekolah dan Wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Keduanya dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam pengambilan keputusan tentang program dan evaluasinya.

Wawancara berfokus pada lima hal yakni perencanaan evaluasi program, penentuan tujuan dan indikator, kendala perencanaan, peran perencanaan evaluasi bagi mutu layanan, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Jawaban informan dicatat, diringkas, dan dikelompokkan menurut kelima fokus tersebut.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap pembahasan, temuan wawancara dibandingkan dengan konsep dalam literatur untuk melihat kesesuaian, perbedaan, dan ruang penguatannya. Keabsahan data dijaga dengan membandingkan pernyataan kedua informan serta mengaitkannya dengan sumber pustaka. Perlu dicatat bahwa penelitian ini terbatas pada dua informan dan satu sekolah, sehingga temuan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Evaluasi Program Pendidikan di SMK Al Imran

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan evaluasi di SMK Al Imran tidak dilakukan secara spontan, melainkan diawali dengan menentukan program yang akan dievaluasi, menetapkan tujuan evaluasi, menentukan aspek yang akan dinilai, dan menyiapkan metode pengumpulan data (wawancara dengan Kepala SMK Al Imran, 9 Oktober 2026). Urutan ini sejalan dengan gambaran umum dalam literatur, yang memandang perencanaan evaluasi sebagai rangkaian keputusan apa objeknya, apa tujuannya, apa yang diukur, dan bagaimana data dikumpulkan.

Pemilihan program yang akan dievaluasi layak mendapat perhatian khusus karena sekolah tidak mungkin, dan tidak perlu, mengevaluasi seluruh programnya dalam waktu yang sama. Dengan memilih program tertentu, sekolah dapat memusatkan energi pada hal yang paling berpengaruh bagi mutu layanan. Namun, dari penjelasan informan belum tampak kriteria pemilihan yang dirumuskan secara eksplisit, misalnya berdasarkan tingkat urgensi, besarnya anggaran, atau keterkaitan dengan standar mutu. Di sinilah kerangka seperti CIPP dapat membantu, sebab model ini mengajak evaluator menimbang konteks kebutuhan, masukan, proses, dan hasil sehingga pilihan objek evaluasi memiliki dasar yang lebih kuat (Suri & Hariyati, 2024).

Aspek lain yang menonjol adalah pelibatan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam proses perencanaan. Pelibatan ini bernilai strategis karena evaluasi yang disusun bersama cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah dan lebih mudah diterima ketika hasilnya disampaikan. Dari sisi psikologi organisasi, pelaku program yang diajak merancang evaluasi akan memandang evaluasi sebagai alat belajar, bukan sebagai alat penghakiman. Pengalaman evaluasi kinerja di lembaga pendidikan lain pun menunjukkan bahwa penerimaan para pelaku sangat memengaruhi kelancaran proses penilaian (Navlia et al., 2024).

Fungsi hasil evaluasi di sekolah ini dirumuskan secara sederhana tetapi tepat untuk mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana atau masih perlu diperbaiki. Rumusan tersebut memosisikan evaluasi sebagai upaya membandingkan antara perencanaan dan pelaksanaan yang sebenarnya, tetapi jika ditelaah lebih lanjut rumusan ini masih terbatas pada aspek proses dan kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi yang lebih lengkap juga akan menanyakan apakah rencana itu sendiri sudah tepat bagi kebutuhan peserta didik, dan apakah hasil akhir program benar-benar memberi dampak. Kedua pertanyaan tersebut berkaitan dengan dimensi konteks dan produk dalam kerangka CIPP (Agustina & Mukhtaruddin, 2019).

Perencanaan evaluasi di SMK Al Imran dapat dinilai sudah memiliki fondasi yang baik karena tahapan pelaksanaannya tersusun secara runtut, pelibatan pelaku cukup luas, dan fungsi hasil evaluasinya jelas. Penguatan yang masih terbuka terletak pada kriteria pemilihan program dan perluasan cakupan evaluasi dari sekadar kesesuaian rencana menuju penilaian konteks dan dampak.

Penentuan Tujuan dan Indikator Keberhasilan dalam Perencanaan Evaluasi

Menurut keterangan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, tujuan evaluasi di SMK Al Imran ditentukan dengan bertolak dari tujuan program pendidikan yang telah direncanakan dan dari kebutuhan sekolah. Setelah tujuan ditetapkan, sekolah menetapkan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diamati (wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, 9 Oktober 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan adanya dua landasan utama dalam penetapan tujuan evaluasi yaitu landasan internal yang mengacu pada tujuan program sehingga evaluasi berfokus pada pencapaian yang telah ditetapkan dan landasan kontekstual yang

mempertimbangkan kebutuhan sekolah dalam menentukan aspek yang perlu dievaluasi sesuai dengan kondisi dan prioritas pada waktu tertentu.

Penetapan tujuan evaluasi berdasarkan tujuan program merupakan prinsip mendasar dalam pelaksanaan evaluasi karena tujuan program menjadi acuan untuk menentukan tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu program. Praktik yang diterapkan di SMK Al Imran telah mencerminkan prinsip tersebut. Selain mengacu pada tujuan program sekolah juga mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang seiring perubahan kondisi sehingga tujuan evaluasi tetap relevan dengan situasi dan prioritas sekolah.

Pemilihan indikator yang dapat diukur dan diamati juga perlu diperhatikan karena indikator yang terukur memungkinkan dilakukannya perbandingan dari waktu ke waktu maupun antara capaian dan target, sedangkan indikator yang teramati menjaga agar penilaian tidak bergantung pada tafsir subjektif semata. Dalam konteks sekolah kejuruan, indikator semacam ini dapat berupa tingkat kehadiran kegiatan praktik, kesesuaian materi dengan standar kompetensi, ketersediaan alat praktik, atau keterserapan lulusan. Penulis menekankan bahwa contoh-contoh tersebut merupakan ilustrasi analitis dan bukan temuan wawancara.

Meski demikian ada beberapa hal yang layak dikritisi dan diperkuat, yang pertama pernyataan informan belum menjelaskan apakah indikator dilengkapi dengan nilai acuan atau target yang spesifik. Kedua, belum tampak keseimbangan antara indikator kuantitatif dan kualitatif. Aspek seperti kepuasan peserta didik atau kualitas interaksi pembelajaran sering kali tidak tertangkap oleh angka, padahal justru aspek-aspek itulah yang membentuk pengalaman layanan. Ketiga, tidak ada penjelasan mengenai siapa yang menyepakati indikator dan bagaimana indikator itu disosialisasikan. Tanpa kesepakatan, indikator dapat dibaca berbeda oleh pihak yang berbeda, dan perbedaan inilah yang kelak memicu kesulitan koordinasi.

Kerangka CIPP menawarkan cara menata indikator yang lebih lengkap, sebab setiap komponennya menuntut indikator yang berlainan kebutuhan dan kelayakan tujuan pada konteks, kecukupan sumber daya pada masukan, ketepatan pelaksanaan pada proses, serta pencapaian pada produk (Aziz et al., 2018). Sekolah tidak harus menerapkan seluruh komponen pada setiap program, tetapi memakai kerangka ini sebagai daftar periksa akan membantu memastikan tidak ada dimensi penting yang terlewat.

Kendala dalam Perencanaan Evaluasi Program Pendidikan

Kepala sekolah SMK Al-Imran mengidentifikasi lima kendala yaitu keterbatasan waktu karena guru dan tenaga kependidikan memiliki tugas lain, keterbatasan sarana dan prasarana yang memengaruhi pelaksanaan evaluasi, kurangnya data yang lengkap sehingga keberhasilan program sulit dinilai menyeluruh, koordinasi yang belum optimal ketika pihak yang terlibat belum memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan evaluasi, dan keterbatasan anggaran, terutama bila evaluasi memerlukan fasilitas atau kegiatan tambahan.

Kelima kendala tersebut tidak dapat dipandang sebagai permasalahan yang terpisah karena semuanya saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain.

Keterbatasan waktu membuat pengumpulan data tidak sempat dilakukan secara rutin, dan akibatnya data menjadi tidak lengkap. Data yang tidak lengkap menyulitkan penilaian menyeluruh, sehingga sekolah cenderung mengandalkan kesan, yang lalu memperbesar perbedaan pemahaman antarpihak dan melemahkan koordinasi. Sementara keterbatasan sarana dan anggaran membatasi pilihan metode pengumpulan data, misalnya penggunaan sistem pencatatan digital atau survei yang lebih luas.

Keterbatasan waktu menjadi salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan karena berkaitan erat dengan tingginya beban kerja yang harus diselesaikan secara bersamaan oleh guru dan tenaga kependidikan. Guru dan tenaga kependidikan harus mengajar, mengurus administrasi, dan membina peserta didik, lalu masih diminta pula menyusun dan menjalankan evaluasi. Hal serupa dijumpai dalam kajian tentang evaluasi di lembaga pendidikan lain, ketika tugas evaluasi sering dianggap tambahan bukan bagian dari alur kerja inti. Jalan keluarnya bukan menambah beban yang ada melainkan menyatukan evaluasi ke dalam kegiatan rutin, misalnya dengan menjadwalkan evaluasi dalam kalender akademik dan memakai instrumen yang ringkas.

Permasalahan data juga menjadi aspek mendasar yang perlu diperhatikan karena keberadaan data yang akurat dan relevan merupakan landasan penting dalam pelaksanaan evaluasi. Kajian tentang manajemen mutu layanan pendidikan di era digital menggarisbawahi bahwa sistem pengelolaan data yang baik menjadi penopang pengambilan keputusan mutu. Bagi SMK Al Imran, langkah realistis adalah membangun basis data sederhana yang diperbarui berkala sehingga setiap evaluasi tidak perlu memulai pengumpulan dari nol.

Koordinasi yang belum optimal berkaitan dengan hal yang telah dibahas pada bagian indikator yakni perbedaan pemahaman tentang tujuan evaluasi sering kali bukan karena kurang niat, melainkan karena tidak ada ruang untuk menyamakan persepsi sejak awal. Pertemuan perencanaan singkat sebelum evaluasi dimulai dengan memaparkan tujuan, indikator, dan peran masing-masing pihak, dapat menekan masalah ini. Peran supervisi dan kepemimpinan kepala sekolah juga penting dalam memastikan bahwa sistem mutu berjalan selaras antar unit (Simarmata, 2024).

Keterbatasan sarana dan anggaran perlu dipandang secara proporsional karena tidak semua kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang besar sehingga pelaksanaannya tetap dapat disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tujuan dan kualitas evaluasi yang ingin dicapai. Evaluasi yang berfokus pada program prioritas dan memanfaatkan data yang sudah tersedia dapat dilakukan dengan sumber daya terbatas. Sekolah tetap perlu mengalokasikan anggaran minimal untuk evaluasi dalam rencana kegiatan dan anggaran, agar evaluasi tidak bergantung pada kebaikan hati sesaat.

Peran Perencanaan Evaluasi Program Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan

Informan menggambarkan perencanaan evaluasi sebagai pedoman untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan suatu program pendidikan sehingga melalui evaluasi yang terencana, sekolah dapat mengetahui apakah proses pembelajaran telah berjalan baik, apakah kebutuhan peserta didik telah terpenuhi, dan apakah fasilitas pendidikan sudah mendukung kegiatan belajar.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran perencanaan evaluasi di sekolah dipahami dalam tiga dimensi mutu layanan. Dimensi pertama adalah proses pembelajaran, yaitu inti layanan pendidikan. Dimensi kedua adalah pemenuhan kebutuhan peserta didik, yang mencerminkan orientasi layanan kepada penerima manfaat. Dimensi ketiga adalah dukungan fasilitas, yang menjadi syarat bagi berlangsungnya proses belajar yang bermakna. Ketiganya memang mewakili aspek utama mutu layanan sebagaimana dibahas dalam literatur manajemen mutu pendidikan (Asyibli et al., 2025).

Hasil evaluasi program menjadi masukan bagi penetapan dan peninjauan standar mutu, evaluasi tidak lagi berdiri sebagai kegiatan terpisah, tetapi menjadi bagian dari siklus peningkatan mutu. Berdasarkan penjelasan informan belum diperoleh gambaran yang memadai mengenai sejauh mana perencanaan evaluasi telah terintegrasi dengan dokumen mutu yang berlaku di SMK Al Imran. Kondisi ini menunjukkan perlunya penelusuran lebih lanjut terhadap keterkaitan antara perencanaan evaluasi dan dokumen mutu sekolah agar hubungan keduanya dapat dipahami secara lebih jelas. Hasil penelusuran tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi sejauh mana temuan evaluasi telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan sekolah.

Secara kritis penyebutan perencanaan evaluasi sebagai pedoman perlu diperkuat dengan penjelasan bahwa keberadaan pedoman merupakan dasar penting dalam pelaksanaan evaluasi tetapi belum menjamin keberhasilan tanpa didukung oleh pelaksanaan yang konsisten pemantauan yang berkelanjutan serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi yang diperoleh. Pedoman yang baik tidak otomatis meningkatkan mutu, kecuali dijalankan secara konsisten dan hasilnya diikuti oleh tindakan. Kajian tentang evaluasi program berkelanjutan memperlihatkan bahwa dampak evaluasi terhadap mutu pembelajaran muncul apabila evaluasi dilakukan terus-menerus, bukan sekali waktu (Nazilah & Navlia, 2026).Peran strategis perencanaan evaluasi dapat terwujud secara optimal apabila pelaksanaannya menjadi bagian dari budaya kerja sekolah melalui kegiatan evaluasi yang dilakukan secara teratur dengan indikator yang telah disepakati bersama serta hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah perbaikan dan pengambilan keputusan.

Perencanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki dan Mengembangkan Mutu Layanan

Tindak lanjut hasil evaluasi di SMK Al Imran direncanakan melalui lima langkah yaitu mengidentifikasi kekurangan program, menentukan prioritas perbaikan, menyusun langkah penyelesaian, menetapkan pihak yang bertanggung

jawab, dan menentukan waktu pelaksanaan. Rangkaian ini tergolong matang karena mencakup unsur yang sering terlewat dalam praktik, yaitu penanggung jawab dan tenggat waktu. Banyak rekomendasi evaluasi gagal bukan karena isinya keliru, melainkan karena tidak jelas siapa yang harus bertindak dan kapan.

Langkah penentuan prioritas memiliki arti penting mengingat sumber daya sekolah terbatas, sebagaimana tampak pada bagian kendala. Tidak semua kekurangan dapat diperbaiki sekaligus. Prioritas memaksa sekolah memilih berdasarkan urgensi dan dampak terhadap mutu layanan, sehingga energi tidak tersebar. Penetapan penanggung jawab dan waktu menjadikan tindak lanjut dapat dipantau, dan pemantauan inilah yang membedakan rencana perbaikan dari sekadar niat baik (Navlia & Jannah, 2025).

Terdapat dua catatan kritis yang pertama, uraian informan menitikberatkan pada perbaikan kekurangan, sedangkan tujuan yang lebih luas adalah memperbaiki *dan mengembangkan* mutu layanan. Hasil evaluasi tidak hanya menunjukkan apa yang kurang, tetapi juga apa yang telah berhasil dan layak diperluas. Praktik baik pada satu program dapat direplikasi pada program lain, dan inilah dimensi pengembangan yang perlu ditegaskan dalam perencanaan tindak lanjut. Kedua, belum tampak mekanisme untuk mengevaluasi tindak lanjut itu sendiri. Perbaikan yang telah dijalankan perlu dinilai kembali, apakah benar menyelesaikan masalah atau malah menimbulkan masalah baru. Tanpa putaran umpan balik ini, siklus mutu tidak tertutup (Navlia & Sholehah, 2025).

Dengan menyambungkan temuan evaluasi, perbaikan, dan evaluasi ulang, sekolah membentuk siklus berkelanjutan yang menjadi inti manajemen mutu. Dalam siklus itu, perencanaan evaluasi tidak hanya mengawali evaluasi, tetapi juga merancang jembatan menuju tindak lanjut sejak awal setiap temuan yang diharapkan sudah dipikirkan akan dibawa ke keputusan apa, dan oleh siapa.

KESIMPULAN

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan evaluasi program pendidikan memegang peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu layanan di SMK Al Imran. Pertama, perencanaan evaluasi di sekolah ini telah berlangsung secara sistematis, melalui pemilihan program, penetapan tujuan, penentuan aspek penilaian, dan penyiapan metode pengumpulan data dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kedua, tujuan evaluasi diturunkan dari tujuan program dan kebutuhan sekolah, lalu diwujudkan dalam indikator yang terukur dan teramati, meskipun penguatan pada target, keseimbangan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta kesepakatan antarpihak masih diperlukan. Ketiga, kendala yang dihadapi berupa keterbatasan waktu, sarana dan prasarana, data, koordinasi, serta anggaran saling berkaitan dan bersifat struktural, sehingga pemecahannya memerlukan penataan sistem, bukan hanya upaya individual. Keempat, perencanaan evaluasi berfungsi sebagai pedoman untuk mengenali kelebihan dan kekurangan program pada aspek proses pembelajaran, pemenuhan kebutuhan peserta didik, dan dukungan fasilitas, dan perannya akan semakin kuat jika diintegrasikan dengan sistem penjaminan mutu internal. Kelima, tindak lanjut

hasil evaluasi telah dirancang melalui identifikasi kekurangan, penentuan prioritas, penyusunan langkah, penetapan penanggung jawab, dan penentuan waktu, namun masih dapat dikembangkan dengan penekanan pada replikasi praktik baik dan evaluasi ulang terhadap tindak lanjut.

SARAN

Bagi SMK Al Imran, disarankan agar sekolah merumuskan kriteria pemilihan program yang akan dievaluasi, melengkapi indikator dengan target yang jelas, serta menyeimbangkan indikator kuantitatif dan kualitatif. Sekolah juga dianjurkan membangun basis data sederhana yang diperbarui secara berkala, menjadwalkan evaluasi dalam kalender akademik agar tidak menjadi beban tambahan, dan mengalokasikan anggaran minimal untuk kegiatan evaluasi. Pertemuan penyamaan persepsi sebelum evaluasi dimulai akan membantu memperbaiki koordinasi.

Bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, pengintegrasian hasil evaluasi program ke dalam dokumen dan standar mutu sekolah perlu diperkuat, termasuk mekanisme pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut. Pemanfaatan kerangka CIPP sebagai daftar periksa perencanaan dapat memperluas cakupan evaluasi dari kesesuaian dengan rencana menuju penilaian konteks dan dampak.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian dapat diperluas dengan melibatkan informan lebih beragam, seperti guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan mitra industri, serta menggunakan observasi dan telaah dokumen untuk memperkuat triangulasi. Penelitian lanjutan juga dapat menguji secara empiris dampak perencanaan evaluasi terhadap indikator mutu layanan dalam periode yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, N. Q., & Mukhtaruddin, F. (2019). The CIPP model-based evaluation on Integrated English Learning (IEL) program at Language Center. *English Language Teaching Educational Journal, 2*(1), 22–31.

Ambiyar, & Muharika, D. (2019). *Metodologi penelitian evaluasi program*. Alfabeta.

Asyibli, B., Romadhon, A. M., Zohriah, A., & Muin, A. (2025). Quality management of Indonesian education services in the digital era: A systematic literature review. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*.

Astutik, D. F., & Navlia, R. (2025). Konsep dan urgensi evaluasi program pendidikan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Media Akademik, 3*(10).

Aziz, S., Mahmood, M., & Rehman, Z. (2018). Implementation of CIPP model for quality evaluation at school level: A case study. *Journal of Education and Educational Development, 5*(1), 189–206.

Hidayah, L., & Navlia, R. (2025). Merancang evaluasi program pendidikan: Konsep, tahapan, dan komponen perencanaan. *Jurnal Psikososial dan Pendidikan (Psikosospen), 1*(3).

Maulana, M. M., & Suwadi, S. (2024). Integration of internal quality assurance system in improving quality standards for education management in schools. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 8*(2).

Navlia, R., & Jannah, I. W. (2025). Model dan rancangan evaluasi program pendidikan. *Jurnal Kependidikan Islam, 15*(1), 44–54.

Navlia, R., & Kaila, U. (2025). Dasar-dasar dan ruang lingkup evaluasi pendidikan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2*(6), 744–749.

Navlia, R., Masrurah, W., Buna'i, Wahid, A., Munawarah, & Sa'bana, S. M. (2024). Performance evaluation of administrative staff at Madrasah Tsanawiyah Ziyadatut Taqwa. *re-JIEM (Research Journal of Islamic Education Management), 7*(2), 380–394.

Navlia, R., & Sholehah, R. (2025). Optimalisasi pendidikan melalui evaluasi program yang terstruktur. *Sindoro: Cendikia Pendidikan, 18*(2), 861–870.

Nazilah, U., & Navlia, R. (2026). Evaluasi program pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan, 4*(1).

Simarmata, B. (2024). Education quality management: Communication management and the principal strategy in improving the quality of education at SMPN Medan. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5*(3), 2135–2144.

Sulkifli, Nade, E., Khumairah, E. S., & Riska. (2024). Pendekatan CIPP dalam evaluasi program pendidikan: Tinjauan literatur pada program pendidikan di Indonesia. *JMPI: Jurnal Manajemen, Pendidikan dan Pemikiran Islam, 2*(2), 136–143.

Suri, S., & Hariyati, N. (2024). CIPP evaluation model in the educational evaluation: A literature study. *Cahaya Pendidikan, 10*(1).

Wulan, M. P., Listyasari, W. D., Santosa, H., & Huda, S. A. (2026). A systematic literature review on the CIPP evaluation model in education: Examining its trends, applications, and research gaps. *Journal of Educational Sciences*.